

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer*

David Levine

Harry Benda telah mencirikan pembentukan teori Indonesia pasca kemerdekaan sebagai gambaran jawaban yang pada dasarnya sangat njlimet serta mempersif untuk persoalan yang pada hakekatnya keliru, atau tidak relevan.¹ Meskipun, sebagaimana akan kita lihat, dalam analisisnya sendiri juga ditemukan kelemahan-kelemahan dasar yang serupa dengan yang ia kritik, keluhannya baik untuk diperhatikan. Mereka yang mengusahakan pemecahan masalah dari pemahaman duapuluh tahun terakhir sejarah Indonesia, pada umumnya gagal melampaui pengertian gejala dipermukaannya. Mereka ternyata sangat asyik dengan seluk-beluk kehidupan politik parlemen sehingga kebanyakan waktunya dihabiskan untuk penyortiran manuver-manuver kabinet dan parlemen. Kegagalan untuk menembus ke pokok-pokok masalah ini harus ditegaskan, tidak bisa dipertalikan dengan kurangnya kecerdasan, kejujuran atau keserjanaan. Agaknya sumber kesulitan mesti ditempatkan pada perspektif dasar darimana analisa bergerak. Pendekatan tertentu yang dipakai oleh seorang teoritikus tidak saja menetapkan watak analisisnya tapi juga persoalan yang diajukan maupun persoalan yang tidak diajukan. Jika persoalan yang diajukan tidak tepat, analisisnya tak akan mampu menjelaskan gejala yang berada di bawah kajiannya.

Setiap usaha menganalisa sistem politik Indonesia *dari dalam (fromwithin)*, menerima struktur sosial yang merupakan tiang pondasinya, juga harus menerima irrasionalitas sistem. Dengan

* Dimuat dalam *Indonesia*, no. 7, April 1969.

¹ "Democracy in Indonesia," *Journal of Asian Studies*, 23, 3 (May 1964), hal. 449.

kata lain, jika ada kelompok-kelompok sosial dan kelas-kelas yang memegang kekuasaan politik serta ekonomi menggunakan kekuasaan itu untuk merintang ketimbang mempermudah kemajuan, maka sistem sosial yang dikuasai adalah irasional. Sejarah mempunyai logika internalnya sendiri dalam arti bahwa memperlihatkan perkembangan hukum-hukum perkembangan yang obyektif. Proses-proses mental akan merefleksikan logika obyektif ini. Dengan menolak hukum-hukum perkembangan sejarah, teori analitis mengikat dirinya pada "saat sekarang," menjadikannya tidak mampu memimpikan perubahan sosial yang revolusioner, dan pada hakekatnya menolak kemungkinan kemajuan. Berkenaan dengan di Indonesia, pembentukan teori semacam itu menjadi terbatas sama sekali pada sistem sosial yang pada dasarnya bersifat mundur. Bila mana pemikiran permasalahannya dilahirkan dengan cara menerima sistem seperti "apa adanya," maka pemikiran tak akan dapat memahami sistem sosial sebagai suatu gejala yang ada akar sejarahnya dan bersifat sementara maupun menyediakan pemecahan permasalahan masyarakat yang harus diketemukan pada transformasi sistem itu sendiri.

Sifat tak memuaskan dari analisis-analisis Indonesia modern yang ada tentunya mengecilkan hati mengingat kesegaran dan keseriusan masalah-masalahnya. Di masa depan kelihatannya (setidak-tidaknya pada permukaan) tak akan terpecahkan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, inflasi serta ketidakstabilan politik. "Demokrasi konstitusional" tahun 1950-an lambat laun menjelma menjadi kediktatoran militer yang lebih sejalan dengan realitas-realitas sosial pokok. Kebutuhan pada suatu teori yang bisa digunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah itu mulai dirasakan akhir-akhir ini.

Salah satu usaha yang mengesankan untuk menjelaskan kehidupan politik Indonesia adalah dari Herbert Feith.² Karyanya berkenaan dengan penyebab ketidakstabilan kehidupan politik yang seluruh

² Feith, *Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962).

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

periode semenjak revolusi. Feith mencoba menjelaskan peristiwa-peristiwa dari segi pembelahan di dalam elit Indonesia. Di satu pihak sekelompok orang (dihubungkan dengan Hatta) yang ditunjuknya sebagai elit "administratif." Orang-orang ini khususnya terlibat dengan urusan-urusan sehari-hari pengaturan negara dan pemantapan perekonomian. Berhadapan dengan kelompok ini adalah apa yang ditunjuknya sebagai "pembina-solidaritas" (*solidarity-makers*), dipimpin oleh Sukarno. Kelompok yang terakhir lebih berurusan dengan simbol-simbol revolusi dan pelanjutan revolusi dari administrasi pemerintahan. Kelompok pertama dilihat Feith sebagai lebih konservatif dan berorientasi pada Barat (*Western-oriented*) dan juga lebih efisien serta cakap dari pada yang kedua. Bagi Feith "sejarah periode ini merupakan kisah kegagalan politik kelompok pimpinan Hatta."³ Di dalam Indonesia pertalian kelompok ini adalah melalui "urusan yang bersifat birokrasi"; ingin mempertahankan apa yang merupakan "struktur administrasi dan ekonomi modern" peninggalan jaman kolonial.

Adalah dalam pertempuran intra elit antara kedua kelompok itu Feith menemukan sumber ketidakstabilan politik periode tersebut. Tapi untuk penyebab gagalnya demokrasi konstitusional, ia dipaksa memusatkan perhatian pada "faktor-faktor yang berhubungan dengan keresahan politik." Sumber keresahan ini ada pada revolusi, dan kelompok-kelompok yang dikaitkan dengannya yang berada di luar elit. Masalah-masalah utama yang memaksa elit untuk terlibat (dan terus) adalah masalah-masalah "bagaimana keresahan ini akan ditangani."⁴

Sejauh sumber kegagalan demokrasi konstitusional ada pada keresahan kelompok-kelompok di luar elit benar, itu adalah faktor eksternal dari seluruh struktur teoritis Feith. Masalahnya kemudian menjadi salah satu keterangan mengenai eksistensi keresahan ini dan menerangkan pengaruhnya pada kehidupan politik Indonesia.

³ Feith, *Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, h. 604.

⁴ *ibid.*, h. 606.

Kita memperoleh sedikit kemajuan dari penunjukkan bangkitnya kelompok “pembina solidaritas” karena memanfaatkan keresahan ini jika kita tidak mengalihkan analisis kita pada hubungan-hubungan sejarah, sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok penguasa dengan massanya. Kelompok “pembina solidaritas” tetap merupakan elit penguasa dan disitu tak ada pengertian wakil rakyat yang sesungguhnya (*basic*).

Sifat mengkhawatirkan dari analisis seperti di atas bahkan lebih nyata dalam mendiskusikan Daniel Lev dengan *Transition to Guided Democracy*-nya. Struktur dasar, karyanya amat sebanding dengan karya Feith. Lev juga disibuki dengan peng-katalog-an bulan demi bulan kehidupan politik Indonesia. Karena menggunakan pendekatan ini, perhatiannya adalah pada perkembangan di dalam elit. Tapi barangkali karena sifat periode yang dipilihnya, sebuah faktor baru, di luar elit menerobos ke dalam analisis. Makin meningkatnya keresahan massa, biasanya dihubungkan (meski tidak identik) dengan kebangkitan Partai Komunis (PKI), memaksa gaya PKI masuk ke dalam kehidupan politik demokrasi konstitusional yang ditempuh elit. Adalah banyaknya tuntutan massa yang tidak dapat masuk ke dalam struktur-struktur parlemen melalui mekanisme pemilihan umum yang bertanggungjawab atas pembubarannya. Konfrontasi antara kelas-kelas penguasa dengan unsur-unsur massa yang lebih sadar merupakan tema utama kehidupan politik Indonesia, inilah yang meruntuhkan keseluruhan dasar analisis sejarah Feith dan Lev yang berpusat pada elit. Lev agaknya lebih menyadari daripada Feith. Meskipun gagal membedah pertalian antara elit dengan massanya, pendapat utama analisisnya adalah bahwa “sukses kaum komunis dalam sistem parlementer pada akhirnya memperbesar penggantian sistem tersebut dengan demokrasi terpimpin.”⁵ Wawasan Lev mengenai hubungan PKI dengan sistem demokrasi parlementer penting karena bisa merupakan landasan bagi analisis kehidupan politik Indonesia yang lebih memuaskan maupun kritik karyanya sendiri. Karena itu

⁵ Daniel Lev, *Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics, 1957-1959*, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1966), h. 75.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

bermanfaat mengutipnya agak panjang:

...PKI tidak saja mengancam partai-partai lain, tapi juga seluruh tata-tertib sosial dan politik. Setiap orang bukan saja takut bahwa kaum komunis, segera sesudah berkuasa, akan menggulingkan organisasi politik yang ada, menyingkirkan elit lama, dan secara eksklusif mengajukan ideologinya sendiri. Itulah pokok soalnya secara jelas, meskipun tidak dapat terlalu ditegaskan bahwa tenaga sosial yang dikerahkan PKI tidak dapat ditandingi partai-partai lain yang ada, militer, ataupun (dalam segi-segi keorganisasian) presiden Sukarno.... Dengan menahan secara sungguh-sungguh PKI yang radikal, elit yang menantanginya, partai maupun bukan partai, bisa menegakkan harapan-harapan di masa depan. Penting untuk dijelaskan bahwa elit ini sesungguhnya tetap berkuasa di bawah Demokrasi Terpimpin dan yang terjadi adalah perubahan tajam dari landasan politik pemilihan yang lebih luas menjadi basis elit yang lebih sempit dan lebih tradisional.⁶

Makin bertambahnya popularitas PKI, walaupun sama sekali tidak identik dengan keresahan massa, merupakan petunjuk kuat dan refleksi tajam keresahan tersebut.

Sampai batas ini, maka penting sekali untuk memahami bahwa diskusi telah membawa pendekatan Feith dan Lev jauh menuju persoalan serius. Jika perkembangan pasca kemerdekaan sangat baik di mengerti dari segi bertambahnya ancaman massa yang tidak puas terhadap kekuasaan elit, maka masalah-masalah sejarah yang terpenting berpusat di sekitar sifat struktur sosial Indonesia itu sendiri dan sumber-sumber keresahan dalam ekonomi politik Indonesia. Tapi, dua diskusi tersebut di atas lebih berkenaan dengan perkembangan-perkembangan di tingkat politik belaka (*purely*) daripada dengan masalah-masalah pokok dalam ekonomi politik.

Sebelum menguraikan kritik ini, akan ditengok beberapa teori ekonomi Indonesia kontemporer yang tersedia bagi mahasiswa.

Kita bisa memulai dari jenis analisa yang paling kurang memuaskan yang memahami faktor-faktor politik dan ekonomi sebagai independen pada dasarnya, sungguhpun memiliki pengaruh penting

⁶ *Ibid.*, h. 171.

terhadap satu dengan lainnya. Analisa seperti itu hanya menyediakan persoalan-persoalan politik untuk pembentukan teorinya dari pengertian yang amat sederhana yaitu ketika ketidakstabilan politik menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Sekalipun “kondisi-kondisi ekonomi... amat berhubungan dengan ketegangan-ketegangan politik yang begitu terasa menjengkelkan,” ketegangan yang “dihubungkan dengan revolusi sosial umumnya,” namun demikian, pada dasarnya, “pengalaman Indonesia tahun 1957 hingga 1958 menyajikan contoh paling klasik percabangan ekonomi dari ketidak-stabilan politik.”⁷ Dengan mengabaikan kasatuan ekonomi dan politik, Douglas Paauw memberikan satu contoh menyolok dari sebuah teori analitis yang menyertakan irrasionalitas masalah pokoknya. Dia mengajukan dua pemecahan pokok kesukaran-kesukaran ekonomi Indonesia: pengurangan pengeluaran uang yang berakibat inflasi dan perluasan jumlah penawaran.⁸ Kenyataan mengherankan di sekitar “pemecahanpemecahan” ini adalah bahwa keduanya satu sama lain eksklusif, dalam struktur ekonomi politik Indonesia yang ada sekarang. Jika tak terjadi perubahan dalam “cara pemanfaatan” surplus ekonomi Indonesia,⁹ tak ada sumber keuangan pribadi lain pada daripada inflasi, dan jumlah yang ditawarkan Paauw tak lebih (bahkan mungkin kurang) daripada pernyataan masalahnya.

Kita diperkenalkan dengan sebuah kerangka analitis yang secara mendasar mandul: inflasi diakibatkan (sebagian besar) oleh pengeluaran yang defisit; pengeluaran yang defisit pada gilirannya, diakibatkan dari kurangnya sumber-sumber dana alternatif maupun perlunya mencukupkan belanja ketidakstabilan politik itu sendiri. Maka, jika keresahan massa bisa diredakan, perkembangan ekonomi menjadi yang utama, meskipun keluar dari pengeluaran

⁷ Douglas S. Paauw, “The High Cost of Political Instability in Indonesia,” dalam *Indonesia's Struggle*, ed. B.H.M. Vlekke (The Hague: Netherlands Institute on International Affairs, 1959), h. 23.

⁸ *Ibid.*, h. 30.

⁹ Untuk diskusi tentang konsep Surplus Ekonomi lihat: Paul Baran, *The Political Economy of Growth* (New York: Monthly Review, 1962), bab 2.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

defisit karena bersifat inflasi, pemerintah tak memiliki dana-dana dari sumber-sumber pribumi bagi program-program pembangunan yang efektif.

Di sini tampaknya kita dihadapkan dengan persoalan teoritis (dan praktis) yang tak dapat diatasi. Itu biasanya diterima sebagai suatu "lingkaran setan."¹⁰ Kelihatannya tak ada sumber-sumber untuk membiayai perkembangan ekonomi yang tak mengakibatkan ketidakstabilan politik itu sendiri mengalirkan dana-dana yang secara potensial tersedia bagi perkembangan. Dana-dana seperti itulah yang digunakan untuk tentara serta birokrasi (pamong praja) ketimbang traktor-traktor dan pabrik-pabrik. Tapi pengajuan yang lebih seksama akan mengungkapkan bahwa kekusutan yang dihubungkan dengan para teoritis ini merupakan suatu karya sempurna untuk mereka sendiri. Tidak kelihatan jalan keluar disebabkan karena sempitnya pandangan yang mereka lihat. Untuk menemukan sumber masalahnya perlu mengisolasi asumsi-asumsi pokoknya yang biasanya tidak dinyatakan.

Di dalam tinjauannya terhadap buku Feith, Harry Benda mengecam Feith di sekitar tema ini. Dia berusaha mengeluarkan asumsi-asumsi pokok pendekatan Feith yang membuat hasilnya mandul dan menemukan wawasan seperti berikut:

"sebagian besar persoalan kita... kini terpecah di sekitar tema yang benar-benar istimewa, yang terus begitu kena dikarikaturkan dengan peri-bahasa, "ada apa dengan Indonesia?" Jawaban untuk persoalan yang begitu mendalam ini, walaupun tidak selalu dinyatakan, berbeda dari pengarang ke pengarang, dari disiplin ke disiplin; tapi pada dasarnya semua itu menuju dengan banyak atau sedikit kecerdikan pada penemuan suatu *diabolus ex machina*.¹¹

Kesukaran dengan pendekatan seperti ini, sebagaimana nasehat Benda, adalah bahwa sifatnya tidak menyejarah. Pembentukan

¹⁰ Sebagai contoh: Paauw, "The High Cost of Political Instability," h. 23; dan Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy," dalam Ruth McVey (ed.), *Indonesia*, (New Haven: H.R.A.F., 1963), h. 409.

¹¹ "democracy in Indonesia," h. 450.

teori ini terbatas untuk sejarah barat. Jika ada sesuatu yang salah maka mesti ada beberapa cara tepat untuk Indonesia yang bisa dikembangkan. Dalam arti tertentu tuntutan ini tidak dapat dipersalahkan. Harus ada sesuatu yang secara mendasar tak memuaskan dalam suatu negri di mana kekacauan sosial, kemiskinan, serta kekerasan telah menjadi endemis untuk masa yang lebih lama daripada duapuluh tahun terakhir sejak kemerdekaan. Bagaimanapun juga nada dari pertanyaan “apakah jalannya salah” biasanya jawabannya cenderung menyangkal adanya penyakit struktural sebagai *diabolus ex machina*. Struktur dasar hubungan-hubungan sosial dilihatnya memadai untuk tugas mengejar perkembangan ekonomi serta demokrasi politik; karena itu, jika tujuan-tujuan tersebut terpenuhi hanyalah dikarenakan individu-individu yang berkuasa tidak cakap atau tidak berminat pada kemajuan seperti itu. Dengan kata lain, pendekatan seperti ini menerima struktur sosial begitu saja dan melihat dinamika utamanya tidak pada kelompok-kelompok sosial serta kelas-kelas, tapi dalam individu-individu.¹²

Untuk memahami sejarah Indonesia saat ini kini alternatif yang diberikan Benda adalah terjadinya semacam krisis identitas dalam skala hebat. Selama dua puluh tahun terakhir kita telah menyaksikan “penyesuaian sulit dan sukar bagi Indonesia terhadap identitasnya sendiri.... Suatu proses penyesuaian selektif yang membangkitkan kembali kontinuitas dalam realitas yang berubah.”¹³ Dia berpendapat bahwa periode kolonial Indonesia punya sedikit pengaruh pada kelangsungan sejarah Indonesia yang mendasar. Argumennya adalah bahwa dari segi struktur elit,¹⁴ dan perubahan ekonomi,¹⁵ pengaruh barat, dalam pengertian pokok, adalah pada permukaan (dangkal).

¹² Feith, *Decline of Constitutional Democracy*, h. 108.

¹³ Harry J. Benda, “Decolonization in Indonesia: The Problem of Continuity and Change,” *American Historical Review*, 70 (Juli 1965), h. 1072.

¹⁴ *Ibid.*, h. 1065-66.

¹⁵ *Ibid.*, h. 1066.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

Apa yang berhasil Benda lakukan, yang terpenting, adalah reorientasi pendekatan kita terhadap sejarah Indonesia. Untuk mengevaluasi dan mengupas kritis pendekatannya kita mesti menjelaskan hubungan imperialisme Barat dengan perjalanan sejarah Indonesia. Pertaliannya sangat organis dan berkelanjutan daripada yang Benda sadari. Karena Revolusi Indonesia gagal memutuskan masa depan Indonesia dengan struktur-struktur dan hukum-hukum perkembangan yang ditetapkan hubungan kolonial masa lalu, maka analisis-analisis yang mengabaikan hubungan-hubungan kolonial dan memusatkan perhatian pada kehidupan politik setelah kemerdekaan yang seolah-olah terjadi kemandekan, tak mungkin bisa menjelaskan apa yang dilihatnya. Begitu juga, karena hubungan-hubungan kolonial telah mempengaruhi secara radikal watak masyarakat Indonesia, analisis-analisis (misalnya Benda) yang memperhatikan suatu "identitas" Indonesia masa lalu yang pra kolonial adalah mencari-cari sesuatu yang manfaatnya bisa diragukan.

Kajian-kajian Pelzer¹⁶ dan van der Kroef¹⁷ baru-baru ini menunjukkan bahwa, berlawanan dengan tesis-tesis Benda, perubahan-perubahan penting tengah dan terus berlangsung dalam struktur ekonomi dan sosial desa Indonesia. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa "pada abad yang lalu, dan khususnya empat dasawarsa terakhir, persewaaan (tanah), seiring dengan perkembangan kelas tuan tanah, telah mencapai perbandingan yang mengkhawatirkan di bagian-bagian pedesaan Jawa yang berpenduduk padat."¹⁸ Perubahan-perubahan ini sangat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial dan budaya Jawa.¹⁹ Sejauh ini merupakan perkembangan-perkembangan penting, maka usaha

¹⁶ Karl J. Pelzer, "The Agricultural Foundation," dalam *Indonesia*, ed. McVey.

¹⁷ J. M. van der Kroef, "Indonesia's Economic Future," *Pacific Affairs*, 32 (March 1959), "Peasant and Land Reform in Indonesian Communism," *Journal of Southeast Asian History*, 4, 1 (March 1963); dan "Land Tenure and Social Structure in Rural Java," *Rural Sociology*, 25, 4 (Desember 1960).

¹⁸ van der Kroef, "Land Tenure," h. 422.

¹⁹ van der Kroef, "Indonesia's Economic Future," h. 60.

Benda untuk kembali pada sejarah pra-kolonial merupakan lompatan yang secara serius menyesatkan. hubungan antara periode kolonial dengan situasi Indonesia sekarang ini jauh lebih penting daripada apa yang ditunjukkan diskusi-diskusi ini. Untuk memahami hal ini, kini kita beralih pada para analisis yang telah mengkaji perkembangan-perkembangan sekarang ini dari perspektif sejarah.

Satu diantara beberapa usaha melihat sejarah kontemporer Indonesia sebagai suatu bagian integral perkembangan sejarah adalah dari Clifford Geertz.²⁰ Analisisnya bergerak dari tingkat yang sama sekali berbeda dengan mereka yang didiskusikan sebelumnya. Tapi, analisisnya bukan saja menyoroti ketidakcukupan kelompok teori pertama kita dengan “apakah jalannya salah”; juga, dengan menetapkan hubungan kolonial sebagai kunci perkembangan ekonomi Indonesia, Geertz membawa teori Benda pada kesangsian yang lebih jauh, menurut Geertz:

Perekonomian berfungsi secara amat kurang efisien tetapi (atau lebih tepat karena) perekonomian masih tetap yang dulu-dulu juga. Struktur tematis rangkap tiga yang diumumkan kompeni, dikembangkan oleh sistem tanam paksa, dan diselesaikan oleh Sistem Perkebunan Besar-dualisme teknologi, ketidakseimbangan regional, dan involusi ekologi-masih tetap ada; dan dengan itu semua frustrasi-frustrasi Indonesia tak pernah hilang. ”²¹

Pengaruh kolonialisme Belanda telah mengorbankan kemungkinan-kemungkinan industrialisasi Indonesia demi Belanda. Pembahasannya dengan begitu kuat mengatakan bahwa

²⁰ Lihat: *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California, 1966). Studi yang lain dari J.H. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia* (New York: Institute of Pacific Relation, 1953). Saya tidak memiliki waktu atau ruang untuk karya terakhir ini (Levine). Untuk kritik teori seperti yang diterapkan di Indonesia, lihat Geertz, *Agricultural Involution* h. 61-62. Untuk kritik yang lebih luas dari teori “Dual” lihat Andrew Gunder Frank, “The Development of Underdevelopment,” *Monthly Review*, 18, 4 (September 1966).

²¹ Geertz, *Agricultural Involution*, h. 125.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

perkembangan ekonomi Belanda dan keterbelakangan Indonesia merupakan dua sisi dari keping yang sama. Bagi petani Jawa "Tak adanya sektor industri untuk mana mereka berpindah karena hasil-hasil penanaman dipakai, dalam kata-kata Furnivall, untuk mempertahankan Belanda menjadi Portugal yang lain, yang tak berkembang."²² Adalah hipotesis belaka berspekulasi apakah Indonesia bisa melakukan industrialisasi jika Belanda tak ada. Tapi tidak hipotesis mengatakan bahwa efek keterlibatan Belanda telah menutup kesempatan bagi perkembangan dan memastikan bahwa sejarah perekonomian Indonesia akan menjadi sesuatu yang terbelakang.

Pendirian yang ditekankan di sini adalah bahwa tenaga-tenaga yang menyebabkan keterbelakangan tidak menghilang dengan Revolusi tahun 1949. Justru inilah alasan mengapa pemahaman yang betul seluruh periode kolonial merupakan prasyarat utama untuk pemahaman masalah-masalah sekarang ini. Dalam kata-kata Paul Baran:

"Sesungguhnya tenaga-tenaga yang membentuk nasib dunia terbelakang masih begitu kuat berdampak pada kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Bentuk-bentuknya telah berubah, kehebatannya berbeda kini; asal-usul serta arahnya tetap tak berubah. Sekarang mereka berkuasa karena di masa lalu mereka telah menguasai nasib negeri-negeri kapitalis terbelakang, dan adalah melalui kecepatan serta proses-proses yang dikuasainya akan ditentukan masa depan perkembangan ekonomi dan sosial negeri-negeri ini."²³

H.O. Schmitt telah mengusulkan reinterpretasi kehidupan politik Indonesia, yang dalam beberapa hal penting, amat cocok dengan tesis ini. Bergerak dari premis bahwa politik dan ekonomi mesti disatukan, dia berhasil menjelaskan beberapa aspek penting dari ketidakstabilan politik dari sudut penetrasi asing dalam perekonomian Indonesia.

Melalui pemeriksaan inflasi yang mengganggu Indonesia sejak

²² *Ibid.*, h. 80.

²³ Baran, *The Political Economy of Growth*, h. 163.

kemerdekaan dan melalui penentuan siapa-siapa korban utamanya, Schmitt bisa menerangkan konflik antara Jawa dengan pulau-pulau luar lainnya dipandang dari segi "kepentingan-kepentingan para eksportir dan importir yang saling berlawanan yang "dengan cepat diterjemahkan menjadi konflik antara wilayah-wilayah geografis."²⁴ Analisis ini menuntun kita pada langkah yang lebih maju karena menghubungkan para eksportir dan importir dengan kelompok-kelompok kepentingan. Dari segi kelompok-kelompok ekonomi "birokrasi yang menguasai negara secara berani telah menjalankan kebijaksanaan yang bersifat inflasi dengan mengorbankan kelompok-kelompok pedagang."²⁵ Di sini kita memperoleh pembelahan di dalam elite Indonesia yang pengertiannya lebih substansial dari pada yang menjadi dasar analisis Feith. Tidak saja mengangkat kedangkalan dikotomi "administrator"- "pembina solidaritas," tapi juga mengkaitkan pembelahan elite Indonesia dengan penetrasi perekonomian asing dan dengan kemunduran ekonomi. Schmitt menasehatkan bahwa pemajakan para importir (yang diuntungkan oleh inflasi) "secara politik berbahaya karena begitu pentingnya kedudukan mereka yang ada dalam hubungan-hubungan antara elite Indonesia dan kelompok-kelompok manajerial asing yang mengatur sebagian besar perekonomian Indonesia... "²⁶

Hubungan antara ketidakstabilan politik dengan dominasi perekonomian asing makin bertambah erat. Selama hak milik orang asing dijamin, maka pimpinan politik Indonesia tak akan dapat "secara bebas menentukan sumber-sumber daya negerinya sendiri."²⁷ Dan tak akan dapat mengerahkan dana-dana untuk membiayai perkembangan ekonomi. Suatu analisis seperti dari Feith, yang gagal mengetengahkan kenyataan ini akan tidak mampu

²⁴ H.O. Schmitt, "Post-colonial Politics: A Suggested Interpretation of the Indonesian Experience, 1950-1958," *Australian Journal of Politics and History*, 9, no. 2, (November 1963), h. 177.

²⁵ *Ibid.*, h. 178.

²⁶ *Ibid.*, h. 180.

²⁷ *Ibid.*, h. 181.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

menjawab tantangan yang implisit dalam penjelasan Schmitt dan eksplisit pada Bruce Glassburner:

Mengapa, selain dari tiga usaha yang nyaris melamun dalam menghadapi krisis-krisis keuangan semua kabinet hampir tidak memberikan perhatian? Jika mereka semua nasionalis, mengapa mereka tidak hantam *vested-interest* Belanda dengan hebat? Kalau mereka semua menyebut dirinya orang-orang sosialis, mengapa tidak ada program hebat pendirian perusahaan negara? Mengapa ketika golongan kecil intelektual yang lebih pragmatik kalah, tak ada penolakan tegas terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaannya dan merupakan irama yang merefleksikan bergoyangnya (arah) kutub politik seperti yang dilihat Herbert Feith?"²⁸

Jawabannya, sebagaimana Glassburner berikan (sebagian), adalah dengan adanya pergeseran kolonial dalam hubungan-hubungan ekonomi maka terbuka beberapa alternatif.

Kini akan mungkin lah menentukan sumber kegagalan-kegagalan teori-teori yang telah dibahas pada awal tulisan ini. Sebagaimana telah saya jelaskan pada permulaan, pendekatan yang bertanya "Apakah jalannya salah?" pada dasarnya tidak menyejarah, yaitu menyangkal kesatuan saat sekarang dengan masa lalu Indonesia. Karena memusatkan perhatian kita pada tahun-tahun terakhir, itu mengaburkan sumber-sumber masalah hari ini, yang ada dalam perkembangan sejarah yang lebih luas. Sesungguhnya tidak ada "yang salah" di Indonesia. adanya warisan kolonial dan karena tak adanya Revolusi sosial sejati, merupakan hal-hal yang agaknya tidak dapat dihilangkan karena pertimbangan lain.

Akar kegagalan analisis-analisis ini terletak pada ketidakmampuannya memimpikan suatu alternatif bagi perkembangan ekonomi seperti yang terjadi di Barat dan bagi struktur sosial seperti yang berkembang di Indonesia. Ketidakmampuan ini mewujudkan dirinya melalui berbagai cara. Di antaranya pandangan perkembangan ekonomi sebagai suatu masalah yang semata-mata teknis atau "ekonomis," ketimbang

²⁸ Bruce Glassburner, "Economic Policy Making in Indonesia," *Economic Development and Cultural Change*, 10, no. 2, pt. 1 (January 1962), h. 130.

sebagai suatu persoalan sosial penting yang dikelilingi kelompok-kelompok sosial berlawanan yang mengerahkan kekuatan-kekuatannya. Pada tempat pertama, pemecahan-pemecahan dicapai lewat konsultasi-konsultasi dengan ahli-ahli tentang masalah-masalah teknis mengenai pendirian tiang pancang dan analisis *input-output*. Pada pendapat kedua pemecahbelahan dicapai (kadang-kadang dengan kekerasan) karena kemenangan salah satu kelompok antagonistik. pandangan pertama adalah esensi perhatian Feith yang tertuju pada elite "administratif" atau "yang memecahkan masalah."²⁹ Bila menjurus pada pendirian dasar ini, kita lihat Benda tergabung dengan orang-orang yang dengan amat hebat dikecamnya. Ini merupakan implikasi pendiriannya bahwa, jika Indonesia menjalankan modernisasi (begitulah yang akan terjadi menurutnya), "pembina solidaritas" akan dipaksa menyerahkan-atau sekurang-kurangnya memberikan tempat yang semakin besar pada-"yang memecahkan masalah." Alasan untuk ini adalah bahwa, "modernisasi ekonomi, khususnya, harus mengikuti logikanya sendiri, yang rasional, dan, tentu saja kaku."³⁰

Contoh yang agak berbeda dari pandangan perkembangan ekonomi sebagai faktor teknis belaka adalah pandangan bahwa perkembangan ekonomi netral secara politik. Sehingga jika kita ingin menambah isi "pemecahan" Douglas Paauw untuk kesukaran-kesukaran ekonomi Indonesia, kita mungkin tergoda untuk menasehatkan bahwa jika bukan karena ketidak stabilan politik dan hasilnya mengalirkan dana-dana, sumber-sumber bisa dilepaskan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Lebih jauh kita mungkin tergoda untuk berpendapat bahwa kebanyakan dari kapital potensial ini berasal dari pembayaran perusahaan-perusahaan asing. Masalah dari pendekatan ini adalah bahwa ia memecah-belah perkembangan politik dan ekonomi serta "Sekalipun menyertakan kebenaran dilihat dari bagian-bagiannya

²⁹ Feith, "Dynamics of Guided Democracy," khususnya h. 387-88, 395.

³⁰ "Democracy in Indonesia," h. 455.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

merupakan kebohongan dilihat dari seluruhnya.”³¹ Penyalahgunaan dana-dana merupakan akibat watak hubungan-hubungan kekuasaan di Indonesia. Dalam pengertian itu merupakan hasil perkembangan, atau manifestasi, dari organisasi (atau disorganisasi) sosial ketimbang yang menjadi sebab.

Justus van Der Kroef, yang pada awalnya mengambil posisi berlawanan dengan yang disebutkan di atas, pada akhirnya juga tidak bisa melihat perkembangan ekonomi ini sebagai meliputi transformasi sosial dan politik yang mendalam. Dia mengatakan bahwa struktur sosial lokal telah menjadi rintangan serius bagi perkembangan ekonomi, Tapi ketimbang menyadari perlunya transformasi struktur sosial sebagai aspek terpenting perkembangan ekonomi ia malahan melihat adanya “berbagai struktur sosial lokal dan sifat budaya... sebagai determinan yang diperlukan sekali untuk perkembangan ekonomi.”³² Maka rencana-rencana perkembangan ekonomi akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan struktur-struktur sosial yang ada.

Perspektif ini berbeda tajam dengan merreka yang sadar akan implikasi sosial yang dalam dari perkembangan ekonomi. Untuk pendirian seperti ini agaknya lebih baik mengutip Paul Baran:

“...secara historis perkembangan ekonomi senantiasa berarti transformasi yang meluas dari struktur ekonomi, sosial dan politik masyarakat, dari organisasi produksi, distribusi, dan konsumsi yang dominan. Perkembangan ekonomi selalu didorong oleh kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dalam tata tertib ekonomi dan sosial yang baru, selalu ditentang serta dihalangi oleh mereka yang mempunyai kepentingan dalam *status-quo*, yang mencari dan memperoleh banyak sekali keuntungan dan pakaian gagasan dari susunan masyarakat yang ada, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga-lembaga yang berlaku. Sedikit banyak selalu ditandai dengan benturan-benturan keras, bermula dari gerak terkejut dan tiba-tiba, mengalami kemerosotan dan mencapai tingkatan yang baru tak pernah merupakan proses sopan, harmonis, yang terbentang begitu tenang

³¹ Baran, *Political Economics of Growth*, h. 218.

³² J. M. van der Kroef, “Social Structure and Economic Development in Indonesia,” *Social Research*, 23 (January 1957), h. 417.

sepanjang waktu dan tempat.”³³

Maka inilah suatu contoh tegas teori yang penjelasannya tidak bisa melampaui sistem sosial yang dibangunnya. Para teoritis perkembangan ekonomi kelihatannya mengharapkan kelompok administratif, “yang bertanggung jawab,” dan berorientasi Barat bisa menyelesaikannya. Hanya kelompok itulah yang paling dekat pada kepentingan-kepentingan Barat dan kapital ini selalu dilihat sebagai sangat diperlukan untuk perkembangan. Persoalannya adalah bahwa hubungan erat dengan kapital Barat, bagi Indonesia, telah mengakibatkan keterbelakangan.

Hubungan ini telah ditelusuri dengan begitu baik oleh Geertz. Sekalipun begitu, dipandang dari segi kaitan antara peristiwa-peristiwa politik dengan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang pokok, analisisnya juga gagal. Dia, dibandingkan dengan penulis lainnya mungkin, yang tidak bisa mengusulkan alternatif untuk kelanjutan perkembangan seperti ini. Tema involusi pada dasarnya tidak menyedjarah sejauh ia gagal mencakup juga alternatif yang mungkin dari “ekosistem” sekarang ini; cukup dengan bertanya: “kalau suatu ekosistem... bagaimanakan pengorganisasiannya?”³⁴ Pendekatan ini berantakan bila sistem yang ada itu menahan, sebagai bagian integralnya, kekuatan-kekuatan yang mencoba ataupun sanggup menyelesaikan transformasinya. Karena hal-hal inilah hanya analisis yang bisa membayangkan transformasi suatu sistem sosial yang mencapai pengertian sesungguhnya dari sistem.

Sejauh yang kita catat, analisis Glassburner dan Schmitt³⁵ pun telah gagal dalam bagian terpenting tersebut. Setelah menetapkan dominasi ekonomi asing sebagai sumber utama kesukaran-kesukaran politik dan ekonomi Indonesia paska kemerdekaan,

³³ Baran, *Political Economics of Growth*, h.3-4.

³⁴ Geertz, *Agricultural Involution*, h. 10.

³⁵ Ini tidak berbeda dalam analisa kedua tadi. Lihat pertukaran mereka dalam *Economic Development and Cultural Change*, vol. 10, 11 dan 12. Bagaimanapun mereka tampaknya setuju dengan *point* ini.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

keduanya secara serius telah gagal mengusulkan langkah-langkah yang bisa mengakhiri dominasi sebagai tahap awal menuju perkembangan ekonomi dan stabilitas politik. "Keadaan Indonesia yang menyedihkan sekarang ini" merupakan, tentu saja, "konsekuensi logis dari struktur sosialnya yang sama sekali tidak menguntungkan"-struktur sosial yang didominasi perusahaan asing. Tapi, walaupun Schmitt sanggup menyadari bahwa "struktur sosial yang tak menguntungkan" ini akibat dari pada saat "kekuatan imperial menyerahkan hak politik pada koloninya tanpa menyerahkan juga kekuasaan ekonomi secara berbarengan."³⁶ Dia tampaknya tidak siap mengusulkan alternatif. Pada tulisan di tahun 1963, dia mengusulkan agar Amerika Serikat memborong dan memberikan pada Indonesia saham-saham yang ada, tapi ini jelas melewati bidang yang dapat dipikirkan. Apa yang mesti kita lihat tidaklah pada sekitar diri pemerintah Amerika Serikat, tapi kekuatan-kekuatan sosial di Indonesia yang sanggup bertindak positif untuk mendapatkan kembali pengawasan atas perekonomian Indonesia. Akan tetapi penguasaan ekonomi oleh "orang-orang Indonesia" ternyata tidak akan, dengan sendirinya, cukup menjamin pertumbuhan ekonomi dan perdamaian sosial.

Program-program pembangunan yang kuat dan efektif hanya bisa diselesaikan oleh *satu partai* dengan dukungan organisasi populer yang tersebar luas, partai yang bisa, dengan pengaruhnya, menggerakkan peran aktif massa dalam penyusunan kembali masyarakat Indonesia.

Apa yang diperlukan adalah sebuah kajian tentang struktur dasar masyarakat Indonesia, watak dasar-kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan-kelompok-kelompok sosial yang akan mendukung rencana penyusunan kembali, dan yang menentangnya. Istilah-istilah yang dipakai kebanyakan analisis di atas merupakan usulan sejumlah karya yang masih bisa diluruskan. Sampai saat ini istilah "elite" telah dipakai secara tidak kritis-pembayangan yang

³⁶ Schmitt, "Foreign Capital and Social Conflict in Indonesia, 1950-1958," *Economic Development And Cultural Change*, 10, no. 3 (April 1962), h. 292.

tepat penggunaan istilah ini oleh banyak literatur. Sama sekali tidak jelas, betapapun, apakah konsep “elite” (atau konsep analognya massa) memberi kita kejelasan ataupun ketelitian yang diperlukan untuk pemahaman masyarakat Indonesia. Pemeriksaan yang lebih seksama dari konsep tersebut, yang amat memuaskan untuk menganalisis kulit luar kekuasaan di Indonesia, tak akan berfungsi efektif jika kita mempunyai minat pada dasar pokok kekuasaan tersebut.

Elite, secara garis besarnya, terdiri dari individu-individu yang memegang kedudukan-kedudukan tertinggi lembaga-lembaga resmi yang mempunyai kekuasaan—seperti Parlemen, kabinet, partai-partai politik, dan tentara. Implikasi dari kekuasaan yang bersumber pada lembaga-lembaga ini, dan merupakan wewenang dari individu-individu yang langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga ini ketimbang kelompok-kelompok dan kelas-kelas sosial. Tapi ketepatan konsep ini sama sekali tidak jelas, khususnya dengan mengingat kemunduran yang cepat lembaga-lembaga ini (kecuali tentara) setelah periode singkat kejayaannya. Satu pengalaman yang bisa kita pelajari dari sejarah Indonesia akhir-akhir ini yaitu bahwa, sekali lagi kecuali tentara, kekuasaan nyata di Indonesia secara eksklusif, atau bahkan pada dasarnya, tidak merupakan wewenang lembaga-lembaga yang resminya dipandang sebagai pusat kekuasaan. Kekuasaan nyata dihubungkan dengan pembentukan keputusan-keputusan penting dan, Feith telah menunjukkan,³⁷ parlemen-parlemen dan kabinet-kabinet Indonesia pada umumnya tidak sanggup membuat keputusan.

Ambiguitas istilah elite menjadi sangat kentara bila dipergunakan pada pimpinan PKI. Sementara menganggap pimpinan ini bagian dari elite, anggapan yang sangat tidak mungkin menjelaskan keistimewaan hubungannya dengan kebanyakan orang dalam Partai, menguburkan hubungan PKI dengan partai-partai lainnya dan dengan sistem politiknya sendiri. Sejauh PKI mempunyai landasan kekuasaan karena dukungan kelompok-kelompok dan kelas-kelas

³⁷ Feith, *Decline of Constitutional Democracy*, h. 309, 312, 557.

Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer

sosial yang penting (yaitu para pekerja kota dan desa) ia berbeda dengan partai-partai lainnya. Mengelompokkan pimpinan PKI dengan pimpinan partai-partai nasionalis atau muslim dibawah kategori elit adalah mengaburkan pembagian-pembagian pokok dalam masyarakat Indonesia, pemeriksaan yang teliti tentang itu bisa membawa pada pemahaman kehidupan politik Indonesia yang lebih baik.³⁸ Hal yang lebih jauh, dengan mengelompokkan para pemimpin yang bukan Komunis di bawah judul yang sama (elit) sesungguhnya mengabaikan pembelahan penting dalam kelompok ini (sebagaimana kesan Schmitt) dan karena itu secara serius menyesatkan.

Seperti telah dicatat pada awal esei ini, kelompok-kelompok di luar elit cenderung diberi kedudukan sekunder dalam diskusi-diskusi kehidupan politik Indonesia. Kelompok-kelompok ini biasanya ditunjuk sebagai "*massa*"-suatu ungkapan untuk segala macam orang yang bukan elite dan, karena itu, betapapun berartinya istilah elite tersebut hanya berasal dari pengecualiannya. di sinipun pembedaan-pembedaan penting dikaburkan. Massa, begitulah didefinisikan, sekurang-kurangnya termasuk berbagai kelompok sosial di bawah ini (yang dalam banyak segi saling berlawanan): petani, petani penyewa, proletariat desa dan kota, pengangguran desa dan kota, kelas menengah saudagar dan pedagang, dan kadang-kadang tuan tanah kecil.

Kekacauan istilah ini berangkali bersumber pada sejarah Indonesia yang belakangan itu sendiri. Gerakan nasionalis, karena watak sosialnya tak berbentuk, telah mendorong pengaburan pembagian sosial pokok. Nasionalisme didukung oleh berbagai macam kelompok sosial dan membutuhkan waktu untuk membubarkan kesatuan gerakan yang semu itu dihadapan kemunculan kembali pembagian-pembagian sosial.

³⁸ Jan Pluvier dalam analisa awalnya. Lihat *Confrontations*-nya (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1965). Analisanya kekurangan fakta yang menuju Struktur Sosial Indonesia yang kurang lebih dalam dibanding analisa dari yang lainnya. Dikotomi elit massa-nya adalah lebih berguna namun sedikit mendua sehingga tidak dapat diterapkan.

Agar supaya memahami masyarakat Indonesia kita memerlukan teori yang bergerak ke arah dua dimensi yang begitu sering diabaikan. Beberapa teori yang telah kita bicarakan kebanyakan berdimensi semu, atau permukaan. Kecuali beberapa yang terkemuka,³⁹ teori ini hanya memperhatikan manifestasi-manifestasi dari permasalahan sosial yang terdalam ketimbang dengan masalah-masalah itu sendiri. Teori yang lebih hidup pertama-tama haruslah menembus dasar ketidakstabilan politik dan ekonomi ini dalam struktur sosialnya, dan kedua, ada dimensi sejarah bagi permasalahan Indonesia kontemporer. Jika kita dekati Indonesia masa kini sebagai suatu gejala sejarah, maka ada dua konsekuensi penting yang menyertainya. Pertama, Indonesia kontemporer tidak dapat dipahami secara tertutup, tapi hanya sebagai hasil penyesuaian masyarakat asli dengan imperialisme Barat yang telah mempengaruhi, dan semakin dalam mempengaruhi. Konsekuensi kedua, karena memandang masa kini dalam perspektif sejarah adalah perlu untuk memperlakukan struktur sosial dan ekonomi Indonesia, tidak sebagai rangka di dalam mana pemecahan-pemecahan permasalahan harus dicari tapi sebagai gejala yang mempunyai akar sejarah yang transformasinya akan menjadi satu-satunya pemecahan permasalahannya.

>>><<<

³⁹ Sebagai Contoh, W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: Van Hoeve, 1959).